

## **Abstrak**

Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia menggambarkan dinamika kompleks antara aktor kritis, lembaga negara, dan proses politik. Dalam konteks ini, Feminisme Institusionalisme membantu menjelaskan bagaimana struktur formal dan informal dalam institusi legislatif mempengaruhi proses legislasi. Meskipun terdapat tantangan dari fraksi konservatif dan hambatan struktural, aktor-aktor kunci seperti Komnas Perempuan dan Kaukus Perempuan Parlemen berperan dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Feminisme Institusionalisme menunjukkan bahwa meskipun norma maskulin dominan dalam institusi politik, perempuan dalam posisi strategis dapat memanfaatkan celah-celah institusional untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Proses formulasi RUU TPKS menyoroti bagaimana aktor-aktor kritis bekerja untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender.

## **Abstract**

The ratification of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS) in Indonesia reflects the complex dynamics between key actors, state institutions, and the political process. In this context, Institutional Feminism helps explain how both formal and informal structures within the legislative institution influence the legislative process. Despite challenges from conservative factions and structural obstacles, key actors such as the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Women's Parliamentary Caucus have played significant roles in pushing for policy changes that favor women. Institutional Feminism demonstrates that although masculine norms dominate political institutions, women in strategic positions can exploit institutional gaps to advocate for gender equality. The formulation process of the RUU TPKS highlights how critical actors work to drive more inclusive and gender-just policy changes.